

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SOPIR TRUK KARENA
KELALAIAN MENGAKIBATKAN ORANG LAIN
MENINGGAL DUNIA**

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh :
Lalu Alun Sagoro
C 100 090 071

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Agustus 2015

Dewan penguji

Ketua : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. (.....)

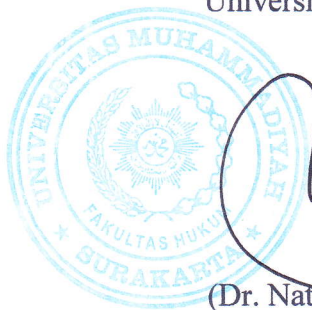
Sekretaris : Hartanto, S.H., . M. Hum. (.....)

Anggota : Muchamad Iksan,SH, MH. (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH, M Hum.)

Perlindungan Hukum Terhadap Sopir Truk karena Kelalaian Mengakibatkan Orang Lain
Meninggal Dunia, Lalu Alun Sagoro, C. 100. 090. 071,
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Sopir Truk karena Kelalaian Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia. Bertujuan mengetahui proses penyelesaian sopir truk karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap sopir truk. Penelitian menggunakan metode yuridis-sosiologis (empiris) yakni penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Hasil dari penelitian: *pertama*, proses penyelesaian hukum melalui proses sumber tindak pidana, penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan di pengadilan. *Kedua*, perlindungan merupakan hak tersangka atau terdakwa dan peran restorasi justise sebagai upaya tersangka untuk dimaafkan keluarga korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Sopir Truk karena Kelalaian Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Legal Protection Against The Truck Driver Negligence Resulting In Another Person Dies, Lalu Alun Sagoro, C 100. 090. 071. Law Faculty, Muhammadiyah University Of Surakarta.

ABSTRACT

The study, entitled Legal Protection Against The truck driver because Failure Causes Other People Died. Aiming to know the process of the settlement of a truck driver for negligence resulting in another person died and examine the implementation of legal protection terhadap truck driver. The study used socio-juridical methods (empirical) that a study of the problem by looking at and pay attention to the prevailing legal norms connected with the facts that exist from the problems encountered in the study. Results of the study: *first*, the legal settlement process melalui source of crime, investigation, prosecution, and investigation process in court. *Second*, the protection of the rights of the suspect or the accused and the role of restoration Justise as a suspect to the victim's family is unforgivable.

Keywords: Legal Protection Against The truck driver because Failure Causes Other People Died

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belakang (*machtsstaat*)”. Disebutkan pula bahwa: “Pemerintah Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada Amendemen ke tiga UUD 1945 tahun 2001 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹

Suatu realita, bahwa proses sosial, ekonomi, politik dan sebagainya, tidak dapat lagi dibiarkan atau diserahkan kepada percaturan kekuatan-kekuatan bebas dalam masyarakat. Proses sosial akhirnya melibatkan campur tangan pemerintah yaitu dengan jalan memelihara, mengatur, dan bahkan membagi di antara mereka. Hofstee mengatakan, bahwa “mereka mencoba dengan didukung oleh perencanaan dan perundang undang yang sistematis, membangun kerangka-kerangka untuk kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dan dalam kerangka ini, kehidupan dari individu dan kelompok dilihat dari tujuan-tujuan tertentu yang dapat berkembang baik, tetapi bersamaan pula dengan itu diarahkan dan diikat dengan ketat.”²

Dengan dikeluarkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No.8/1981) sudah selayaknya kita semua menyambut gembira kehadiran undang-

¹ Muhammad Iksan, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, hal.1.

² Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, hal.1.

undang tersebut di tengah-tengah kita, oleh karena undang-undang tersebut diharapkan akan membawa gagasan baru dengan napas humanisme dan nilai keadilan yang didambakan oleh semua pihak dalam masyarakat kita. Nilai keadilan yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia haruslah merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak dan kepentingan masyarakat dipihak lain.³

Memang KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Terangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlukan sesuai dengan nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakan! Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, “tidak boleh ditelanjangi” hak asasi utama yang melekat pada dirinya.⁴

Kita konstataasi juga bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat. Boleh dikatakan setiap hari terjadi kecelakaan lalu lintas. Sesungguhnya meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas tidak perlu terjadi seperti keadaan sekarang ini. Memang benar jumlah kendaraan bermotor meningkat, tetapi apabila para pemakai jalan raya terutama para pengendara kendaraan bermotor mentaati peraturan lalu lintas dan para petugas ketat mengawasinya serta sikapnya tegas dan konsekuen menghadapi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas tidak perlu terjadi seperti sekarang ini.

³ Romli Atmassasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 67.

⁴ Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.1.

Mengabaikan rambu-rambu lalu lintas terjadi setiap hari. Kendaraan umum dan terutama kendaraan bermotor beroda dua sering membuat kesal dan gelisah pemakai jalan lainnya: kecuali dengan suara knalpot yang mempekakan telinga juga dengan cara mengendarai kendaraannya sehingga membahayakan lalu lintas. Pendek kata kesopanan lalu lintas diabaikan. Bukan hanya itu saja, tanggung jawab para pengendara kendaraan bermotor dapat dikatakan pada umumnya menurun: betapa banyaknya peristiwa tabrak lari. Ini berarti sikap yang tidak toleran dan melanggar kewajiban hukum kewajiban untuk bersikap dan bertindak berhati-hati di dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain.⁵

Kasus kecelakaan di jalan raya yang mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor tewas kembali terjadi. Kali ini, pengendara sepeda motor, yang diduga hendak berputar arah, malah tersenggol truk fuso bermuatan pasir, di Kartasura, Senin (6/5/2013) malam. Pengendara sepeda motor tewas terlindas setelah masuk ke kolong truk sesudah senggolan itu.⁶

Menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Salah satu upaya untuk menanggulangi tunggakan perkara seperti yang dikemukakan dalam buku H.P Panggabean adalah dengan memperdayakan

⁵ Sudikno Mertokusumo, diakses tanggal 7 April 2011”, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, dalam <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat.htm>, diunduh 5 November 2013 pukul 21:00 .

⁶ KOMPAS.com, Selasa, 7 Mei 2013, 02:37 WIB, *Putar Balik Tersenggol Truk, Pengendara Sepeda Motor Tewas*, dalam <http://regional.kompas.com/read/2013/05/07/02370037/Putar.Balik.Tersenggol.Truk.Pengendara.Sepeda.Motor.Tewas>, diunduh 5 November 2013 pukul 21:00.

penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui “upaya damai” atau *alternatif dispute resolution* (ADR).⁷

Menurut Barda Nawawi Arief,

“Memperluas berlakunya Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yaitu mengenai “*afkoop*” atau pembayaran denda damai sebagai alasan penghapus penuntutan untuk delik “pelanggaran”) terhadap semua tindak pidana termasuk “kejahantan” walaupun dapat saja dibatasi berlakunya berdasarkan pembatasan ancaman maksimal pidananya”.⁸

Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh *preventif* (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi pidana itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkrit, akan tetapi sudah ada sejak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan (*theorie des psychischen zwanges*=ajaran *psychis*). Sebagai alat kontrol sosial (*social control*), fungsi hukum pidana adalah subsidier, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Hukum pidana merupakan hukum publik, artinya bahwa hubungan hukum diatur terletak pada kepentingan orang banyak (umum), yang biasanya diwakili oleh pemerintah. Sebagai hukum publik berarti sama dengan hukum tata negara maupun hukum administrasi negara. Di samping hukum publik, ada hukum privat (hukum perdata). Hukum perdata mengatur hubungan antara orang perorang.

Setiap kepentingan yang hendak dipersoalkan tergantung pada masing-masing individu. Hukum tata negara, hukum administrasi negara maupun perdata mempunyai sanksi sendiri-sendiri sebagai sarana untuk menanggulangi perbuatan

⁷ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.64.

⁸ *Ibid*, hal. 64.

melanggarnya. Untuk mencapai tujuan hukum, yaitu mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, di samping jenis-jenis sanksi tersebut, biasanya digunakan pula sanksi pidana sebagai sarana terakhir (pamungkas). Sanksi pidana sebagai sarana terakhir ini disebut *Ultimatum Remedium*, yakni obat terakhir, artinya bahwa sanksi pidana hendaknya baru digunakan apabila sanksi atau upaya-upaya hukum yang lain sudah tidak mempan/mampu.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membatasi masalah pokok kajian pada perumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana proses penyelesaian hukum terhadap sopir truk karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan *Kedua*, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap sopir truk. Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sopir truk karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap sopir truk.

Jenis penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif* yakni penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹⁰

⁹ Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Op. Cit*, hal. 26.

¹⁰ Soejono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Sopir Truk Karena Kelalaian Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Proses penyelesaian hukum terhadap sopir truk karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Proses peradilan pidana adalah suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.¹¹

Pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2013, sekitar jam 15. 00 W.I.B, di jalan umum jurusan Solo menuju Sragen tepatnya depan PO. TRI MULYA Ds. Waru, Kec. Kebakkramat, Kab Karanganyar, telah terjadi kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor (KBM) mitshubishi fuso B-9828-XA yang dikemudikan Sdr. Sukur Fadli Bin Mantlap, kendaraan bermotor (KBM) toyota limo taxi AD-1094-DA yang dikemudikan Sdr. Santoso, sepeda kendaraan (SPM) bermotor yamaha mio AA-2725-RA, sepeda kendaraan bermotor (SPM) suzuki satria AD-2723-GU, yang dikendarai Sdr, Mariyanto.

Tersangka disangka telah melakukan tindak pidana karena salahnya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana pada tercantum pada Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 109 UU RI No. Tahun 2009.

Analisa Yuridis dalam berita acara pemeriksaan nomor: BP/ 199/ VII/ 2013/ Sat. Lantas, bunyi pasal yang dipersangkakan: Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 109 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan pengemudi kendaraan bermotor

¹¹ Zulkarnain, 2006, *Peradilan Pidana Penuntutan Memahami dan Mengawal Peradilan Pidana Bagi Pekerja Anti Korupsi*, Yappika: Jakarta, hal.12.

yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan jalur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan, tersedia ruang yang cukup.

Tindakan peradilan pada tahap penyelidikan dan penyidikan haruslah berdasarkan sumber tindakan, yaitu adanya tindak pidana atau dugaan telah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang.¹²

Sumber tindak pidana pada kasus ini berdasarkan laporan masyarakat yang tertuang dalam laporan polisi nomor: LP/ 199/ VVI/ 2013/ Sat Lantas. Berdasarkan laporan penyidik mendatangi TKP untuk melakukan pemeriksaan di TKP. Di TKP penyidik melakukan tindakan, yaitu: pertama, membuat sket gambar, melakukan pengukuran, mencatat saksi dan mengamankan pelaku yang terlibat dalam kecelakaan; kedua, mengamankan pengemudi kendaraan bermotor mitshubishi fuso B-9828-XA dan kendaraan bermotor mitshubishi B-9828-XA, kendaraan bermotor Toyota Limo Taxi AD-1094-DA, dengan sepeda motor Yamaha Mio AA-2725-RA dengan sepeda motor Suzuki Saria AD-2723-GU dan; ketiga, mengamankan Sim B II Umum A.n Sukur Fadli dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan bermotor Toyota Limo Taxi AD-1094-DA serta Sim B I Umum A.n Santoso.

Pemeriksaan di TKP penyidik melanjutkan ketahap proses pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat 3 KUHAP).

¹² *ibid*, hal. 13.

Pada tahap pemeriksaan tersangka maupun saksi diberikan hak untuk didampingi penasehat hukum atau tidak dan pihak tersangka sebagaimana pada Pasal 114 UU No. 1 Tahun 1981 dan diberikan untuk melakukan kesepakatan damai dengan pihak keluarga korban. Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan keterangan dari saksi-saksi di TKP dan keterangan tersangka untuk menemukan unsur pada pasal yang diduga telah dilanggar.

Pada tahap proses pemeriksaan saksi dan tersangka sekira sudah lengkap berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk segera dimulai ke tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Pelimpahan berkas perkara kasus ini sebagaimana pada berkas perkara nomor: BP/ 199/ VII/ 2013/ Sat. Lantas berisikan sebagai berikut:

Daptar Isi Berkas Perkara

No	Macam Surat dan Macam barang	Banyaknya
1	Sampul Berkas Perkara	satu lembar
2	Daptar Isi Berkas	satu lembar
3	Resume	satu lembar
4	Laporan Polisi	Dua lembar
5	BAP Tempat Kejadian Perkara	satu lembar
6	Sketsa Gambar TKP	satu lembar
7	BA. Kondisi Kendaraan	satu lembar
8	Surat Perintah Penyidikan	satu lembar
9	Surat Perintah Tugas	satu lembar
10	Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan	satu lembar
11	Surat Perintah Penyitaan	satu lembar
12	Berita Acara Penyitaan	satu lembar
13	BA. Pembukusan/ Penyegelan Barang Bukti	satu lembar
14	Surat Tanda Terima	satu lembar
15	Surat Permohonan Ijin Sita Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar	satu lembar
16	Surat Persetujuan Ijin Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar	satu lembar

17	Permintaan <i>Visum Et Repertum</i> . Qoriah Nur C. P	Satu lembar
18	Permintaan <i>Visum Et Repertum</i> . Santoso	Satu lembar
19	Permintaan <i>Visum Et Repertum</i> . Nur Aisyiah D	Satu lembar
20	Permintaan <i>Visum Et Repertum</i> . Mariyanto	Satu lembar
21	Hasil <i>Visum Et Repertum</i> . Qoriah Nur C.P	Satu lembar
22	Hasil <i>Visum Et Repertum</i> . Santoso	Satu lembar
23	Hasil <i>Visum Et Repertum</i> . Nur Aisyiah D	Satu lembar
24	Hasil <i>Visum Et Repertum</i> . Mariyanto	Satu lembar
25	Sprin Penahanan	Satu lembar
26	BA Penahanan	Satu lembar
27	Surat Perpanjangan Penahanan	Satu lembar
28	Surat Perpanjangan Penahanan	Satu lembar
29	BA. Perpanjangan Penahanan	Satu lembar
30	BAP. Saksi An. Nur Aisyiah Desi	Satu lembar
31	BAP. Saksi An. Mariyanto	Satu lembar
32	BAP. Saksi An. Sidiq Nuriyah	Satu lembar
33	BAP. Saksi An. Handoko	Satu lembar
34	BAP. Tersangka An. Sukur Fadli Bin Mantlap	Satu lembar
35	BA. Pemberitahuan dan Penolakan Bantuan Hukum	Satu lembar
36	Daptar Saksi dan Barang Bukti	Satu lembar
37	Daptar Tersangka	Satu lembar
38	Photo TKP	Satu lembar
39	Photo Barang Bukti	Tiga lembar
40	Photo Korban	Satu lembar
41	Copy Surat Kendaraan Bermotor	Satu lembar
42	Surat Pernyataan	Dua lembar
43	Foto Tersangka	Satu lembar

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 ayat 7 KUHAP).¹³

Dalam putusan nomor: 185/ PID.SUS/ 2013/ PN. Kray disebutkan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum merupakan dakwaan kumulatif.

¹³ *Ibid*, hal. 61-62.

Dakwaan kumulatif:¹⁴ 1) berisi beberapa tindak pidana dan masing-masing tindak pidana berdiri sendiri dan; 2) dapat berupa: a) kumulasi dalam penyertaan (*deelneming*) tindak pidana dan; b) kumulasi dalam concursus baik idealis dan realis.

Sebagaimana tertuang dalam Putusan No: 185/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Kray. Dakwaan dimulai dengan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) yang setiap pasal memerlukan pembuktian sendiri-sendiri.

Acara pemeriksaan pada perkara ini menggunakan acara biasa. pemeriksaan, ditinjau dari segi tindak pidana yang diadili pada satu segi, dan dari segi mudah atau sulitnya pembuktian perkara pada pihak lain. Umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun ke atas, dan masalah pembuktian memerlukan ketelitian, biasanya diperiksa dengan “acara biasa”.¹⁵ Perkara nomor: 185/ PID. SUS/ 2013/ PN. Kray dilakukan dengan tahapan: membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, memeriksa dan meneliti alat bukti, memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setelah dilakukan proses pemeriksaan di pengadilan maka Hakim Majelis memutuskan bahwa Terdakwa hanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan pada Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam putusan

¹⁴ *Ibid*, hal. 77.

¹⁵ Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 104.

hakim menyatakan bahwa: *pertama*, menyatakan terdakwa Sukur Fadli Bin Mantlap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia”; *kedua*, menyatakan terdakwa Sukur Fadli Bin Matlap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Jaksa Penuntut Umum; *ketiga*, membebaskan terdakwa dari dakwaan komulatif kedua tersebut; keempat: menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; *kelima*: menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dari pidana yang dijatuhkannya; *keenam*: menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Selanjutnya: *ketujuh*, menetapkan barang bukti berupa: a. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitshubishi Fuso B-9828-XA, 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota Limo Taxi AD-1094-DA, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor Toyota Limo Taxi AD-1094-DA dan 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM) B I Umum Jateng A.n Santoso dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa; b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi B II Umum Jatim A.n Sukur Fadli dikembalikan kepada terdakwa; c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria AD-2723-GU dikembalikan kepada saksi Mariyanto. *Kedelapan*, Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hakim Majelis memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana karena terpenuhi unsur perbuatan dan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang. Unsur kesalahan

suatu perbuatan pidana ada dua yaitu kesengajaan/ *opzet* dan kelalaian/ *culpa*. Sebagaimana pada rumusan Pasal 310 unsur kesalahannya karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Sopir Truk

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap sopir truk pada perkara ini terumata pada Pasal 114 UU No. 81 Tahun 1981 yaitu dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Laka Bapak Mardiyanto pada hari Senin, 23 Maret 2015, jam 10.00 bahwa setiap pemeriksaan penyidik selalu menjelaskan bahwa Tersangka mempunyai hak sebagaimana diatur pada Pasal 114 KUHAP serta diberikan untuk melakukan kesepakatan damai kepada keluarga korban. Dalam kasus ini Tersangka tidak didampingi Penasehat Hukum. Penasehat Hukum merupakan hak tersangk. Tersangka bila tidak mampu maka dapat menggunakan bantuan hukum *pro bono*. Dalam kasus ini Tersangka tidak menggunakan Penasehat hukum dengan surat keterangan yang tertuang dalam surat pemberitahuan dan penolakan bantuan hukum.

Kesepakatan damai antara keluarga korban dengan tersangka diketahui oleh Bapak lurah itu berguna dalam persidangan untuk meringankan putusan sidang. Dalam kasus ini pendekatan restoratif dapat diterapkan untuk agar

keluarga korban dapat memaafkan tersangka dan lebih menjaga silaturahmi antara keluarga korban dan Tersangka.¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan Pidum Kejaksaan Bapak Heru Prasetyo, S.H pada Hari Senin, tanggal 23 Maret 2015, jam 08.30, bahwa pelaksanaan perlindungan hukum dilakukan dengan melihat pada ancaman pasal yang mengancam, pada kasus ini ancaman lebih dari lima tahu maka didampingi penasehat hukum. Pada Pasal 114 KUHAP dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. Terdakwa dapat menggunakan Penasehat *Pro bono* bila dapat tidak mampu atau miskin disertai surat keterangan miskin dari kelurahan dan kecamatan.

Dalam kasus ini tidak dapat diterapkan pendekatan restoratif. Kasus ini berkaitan dengan nyawa maka tidak dapat di restorasi yang dapat di restorasi, misalnya kasus anak dan pencurian. Pendekatan restoratif berbeda dengan halnya perdamaian. Walaupun kasus ada kesepakatan damai kasus harus tetap berjalan.¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wisnu, S.H, M. Kn selaku Humas Pengadilan Negeri pada hari Kamis tanggal 19 maret 2015 jam 09.00 bahwa bentuk pelaksanaan perlindungan hukum sebagaimana pada pasal 114 KUHAP. Menggunakan Penasehat Hukum merupakan hak Tersangka. Menggunakan Penasehat hukum dapat dilakukan dengan *pro bono* (cuma-cuma). Dengan

¹⁶ Mardiyanto, Kepala Unit Laka, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, 23 Maret 2015, pukul 10.00 WIB.

¹⁷ Heru Prasetyo, Jaksa Pidana Umum, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, 23 Maret 2015, pukul 08.30 WIB.

prosedur mengajukan surat untuk mendapatkan bantuan hukum *pro bono* yaitu untuk orang miskin yang berdasarkan surat keterangan miskin. Bantuan hukum secara *pro bono* akan tetapi terkendala pada anggaran yang disediakan oleh pemerintah.

Pengadilan Negeri hanya menyediakan yang wajib didampingi oleh Penasehat hukum yakni delik yang ancamannya lebih dari 12 (dua belas) tahun maka wajib didampingi oleh Penasehat Hukum. Untuk delik yang ancaman pidana kurang dari 12 (dua belas) tahun merupakan hak bagi tersangka.

Pendekatan restoratif pada kasus ini sebagai hal yang meringankan putusan pidana. Dilakukan dengan kesepakatan damai antara keluarga korban dan Terdakwa. Kesepakatan damai ini merupakan upaya Terdakwa untuk memohon maaf agar kesalahannya dimaafkan oleh pihak keluarga korban. Pemulihan hubungan emosional dan kerugian material adalah jauh lebih penting ketimbang penekanan pada hukuman terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana berlaku sekarang ini.¹⁸ Karena ada salah satu kasus bahwa pihak korban yang membiaya seluruh biaya dari pihak Terdakwa. Pada putusan ada point atau bagian yang mencantumkan hal yang meringankan kadang dalam point itu dicantumkan tentang surat kesepakatan damai antara pihak keluarga korban dengan Terdakwa.¹⁹

¹⁸ Rufinus Hotman Hutaeruk, Op. Cit. hal. 111.

¹⁹ Wisnu, Humas Pengadilan Negeri, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, 19 Maret 2015, pukul 09.00 WIB.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, proses penyelesaian kasus sopir truk karena kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya penumpang taksi dan sopir taksi yang meninggal di tempat dan dua pengendara sepeda motor luka berat. Proses penyelesaian kasus ini melalui proses sebagai berikut: a. Sumber tindak pidana; b. Penyidikan; c. Kejaksaan (Penuntutan dan tuntutan) dan; d. Pemeriksaan di Pengadilan Negeri: 1) Pembacaan surat dakwaan; 2) Eksepsi; 3) anggapan terdakwa (jika ada); 4) Tanggapan penuntut umum (jika ada); 5) Putusan sela (jika ada); 6) Pemeriksaan barang bukti (dari saksi JPU selanjutnya dari terdakwa); 7) Tuntutan (*Requisitoir*); 8) Pembelaan (*pledoi*); 9) Tanggapan JPU atas pembelaan terdakwa (replik); 10) Tanggapan terdakwa atas jawaban JPU (duplik) dan; 11) Putusan.

Kedua, bahwa bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap sopir truk sebagaimana yang diatur Pasal 56 jo Pasal 114 KUHAP bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum. Tersangka atau terdakwa ada bantuan hukum *pro bono* bagi mereka yang tidak mampu. Penegak hukum juga memberikan kesempatan untuk melakukan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Kesepakatan damai ini sebagai salah satu upaya restorasi justice. Kesepakatan damai ini bertujuan agar keluarga korban memaafkan tersangka atau terdakwa.

Saran

Kesatu, proses penyelesaian kasus yang ada unsur kesalahan berupa kelalaian sekira dilakukan dengan kekeluargaan; *Kedua*, minimnya pendanaan untuk bantuan hukum *pro bono* lebih memperhatikan atau menjelaskan tentang hak-hak tersangka atau terdakwa dan; dan *Ketiga*, tersangka atau terdakwa melakukan perdamaian dengan keluarga korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Azikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harahap, Yahya, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Iksan, Muhammad, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Zulkarnain, 2006, *Peradilan Pidana Penuntut Memahami & Mengawal Peradilan Pidana bagi Pekerja Aktif Korupsi*, Malang: Yappika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terjemahan Moeljatno, cetkan ke 28, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- KOMPAS.com, Selasa, 7 Mei 2013, 02:37 WIB, *Putar Balik Tersenggol Truk, Pengendara Sepeda Motor Tewas*, dalam <http://regional.kompas.com/read/2013/05/07/02370037/Putar.Balik.Tersenggol.Truk.Pengendara.Sepeda.Motor.Tewas>, diunduh 5 November 2013.
- Sudikno Mertokusumo, diakses tanggal 7 April 2011, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, dalam <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat.html>, diunduh 5 November 2013.